

**PENGARUH KOMITE AUDIT, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN  
UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PADA TINGKAT  
KEPATUHAN PENGUNGKAPAN TRANSAKSI BERELASI  
BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI  
KEUANGAN 7**

***THE EFFECT OF AUDIT COMMITTEE, INDEPENDENT  
COMMISSIONERS, AND PUBLIC ACCOUNTANT FIRM SIZE ON THE  
LEVEL OF RELATED PARTY TRANSACTIONS DISCLOSURE BASED  
ON STATEMENT OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD 7***

**Rocky Putra Wibowo**

*Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta*

*rockyputrawibowo@gmail.com*

**Abstrak: Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen, Dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Pada Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 7.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komite audit, komisaris independen, dan ukuran kantor akuntan publik (KAP) terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 52 perusahaan yang bergerak dalam sektor utama dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan yang didapatkan dari website BEI. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah : (1) komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi, (2) komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi, (3) ukuran KAP berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi, (4) komite audit, komisaris independen, dan ukuran KAP secara bersama berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi.

**Kata kunci:** Komite Audit, Komisaris Independen, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi

***Abstract: The Effect Of Audit Committee, Independent Commissioners, And Public Accountant Firm Size On The Level Of Related Party Transactions Disclosure Based On Statement Of Financial Accounting Standard 7.*** This research aims to analyze the influences of audit committee, independent commissioners, and public accountant firm size on the level of related party transactions (RPT) disclosure. This research used a quantitative method. The number of samples in this research were 52 companies engaged in the main sector and listed on the Indonesia Stock Exchange. The data used in the form of financial statements obtained from Indonesia Stock Exchange's website. Classic assumption test included normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test. Hypothesis test used was simple regression analysis and multiple regression analysis. The results of this study are: (1) audit committee positively affect the level of RPT disclosure, (2) independent commissioners have no significant effect on the level of RPT disclosure, (3) public accounting firm size positively affect the level of RPT disclosure, (4) audit committee, independent commissioners, and public accounting firm size positively affect the level of RPT disclosure.

**Keywords:** *audit committee, independent commissioner, public accounting firm size, related party transaction disclosure level*

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, terdapat dua struktur kepemilikan grup, yaitu struktur kepemilikan tersebar dan struktur kepemilikan terkonsentrasi. Implikasi dari perbedaan struktur kepemilikan adalah pada pengambilan keputusan dalam perusahaan. Pada struktur kepemilikan terkonsentrasi, pemegang saham pengendali dapat memilih dan melantik manajer yang bekerja untuk kepentingan pemegang saham pengendali dan pemegang saham non-pengendali hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki wewenang dalam pemilihan manajer. Pada perusahaan yang dikontrol oleh keluarga atau grup tertentu, direktur noneksekutif umumnya adalah anggota keluarga atau grup. Struktur kepemilikan keluarga dan grup pada perusahaan-perusahaan yang telah go public di Indonesia menyebabkan banyak terjadinya transaksi berelasi (Sari dan Sugiharto, 2014: 7). Transaksi berelasi sebenarnya bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomis bagi perusahaan dan stakeholder melalui peningkatan efisiensi dalam mencapai kesejahteraan grup. Akan tetapi, transaksi berelasi sendiri dalam beberapa kasus sering disalahgunakan untuk tujuan oportunistik atau mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan

pemegang saham non-pengendali bahkan dapat merugikan perusahaan, masyarakat, hingga negara. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya conflict of interest antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non-pengendali.

Berdasarkan teori keagenan (agency theory), hubungan agensi akan ada ketika satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen dan Meckling, 1976: 5). Jensen dan Meckling (1976) juga memandang hubungan antara manajer dan pemegang saham pengendali sebagai pemilik termasuk dalam hubungan keagenan. Dalam hubungan keagenan, terjadi kontrak antara kedua belah pihak. Kontrak antara kedua pihak tersebut mengharuskan bagi pihak agen untuk dapat memberikan jasa kepada pemilik. Pendelegasian wewenang dari pemilik kepada manajemen membuatnya memiliki hak untuk mengambil keputusan bisnis bagi perusahaan untuk kepentingan pemilik. Dalam pendelegasian wewenang tersebut dikarenakan adanya conflict of interest, manajemen dapat menyalahgunakan wewenang yang didapatkan dengan membuat keputusan bukan untuk tujuan ekonomis perusahaan, melainkan

digunakan untuk tujuan oportunistis, termasuk pengambilan keputusan terkait transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Penggunaan transaksi berelasi secara oportunistis dapat digunakan untuk tujuan meningkatkan laba perusahaan, melakukan penjualan dengan harga yang tidak wajar (transfer pricing), atau melakukan pertukaran aset dengan kualitas barang yang berbeda.

Transaksi berelasi bukanlah suatu hal yang dilarang. Namun, dikarenakan terdapat dua kemungkinan dalam tujuan penggunaan transaksi berelasi yaitu untuk tujuan ekonomis atau tujuan oportunistis, sangat diperlukan pengungkapan terkait transaksi berelasi pada setiap laporan keuangan perusahaan. Dalam menyikapi hal tersebut, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan salah satu ayat di PSAK yang mengatur mengenai transaksi berelasi yaitu PSAK nomor 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. PSAK 7 dibuat untuk mengatur transaksi pihak berelasi guna mengontrol adanya transaksi pihak berelasi. IAI sendiri mengharapkan dengan disahkannya peraturan PSAK 7, transaksi antara pihak-pihak yang saling berelasi diungkapkan kedalam laporan keuangan sehingga dapat meminimalkan terjadinya penyalahgunaan transaksi berelasi yang dapat mengakibatkan kerugian pada berbagai

pihak. Selain PSAK 7, Badan Pengawas Pasar Modal atau lebih dikenal dengan BAPEPAM juga telah membuat peraturan yang mengatur pengungkapan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan.

Berdasarkan PSAK No. 7, hal-hal yang wajib untuk diungkapkan terkait dengan transaksi berelasi antara lain hubungan dengan pihak berelasi, jenis transaksi, nilai transaksi, dan sebagainya. Namun, meskipun pengungkapan transaksi berelasi telah diatur dalam PSAK, tingkat pengungkapan wajib perusahaan go public di Indonesia atas pos-pos laporan keuangan masih rendah, yaitu sebesar 56,48% (Sari dan Sugiharto, 2014: 14). Dikarenakan masih lemahnya tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi di Indonesia, tidak sedikit pula perusahaan yang memanfaatkan celah tersebut agar dapat menggunakan transaksi berelasi untuk tujuan oportunistis.

Transaksi berelasi untuk kedepannya diharapkan dapat diawasi dan dikontrol dengan lebih baik dengan adanya peraturan PSAK 7 yang telah dikeluarkan oleh. Transaksi berelasi yang diarahkan ke tujuan oportunistis juga diharapkan dapat diminimalkan dari dalam perusahaan melalui komite audit serta komisaris independen yang merupakan bagian penting dalam penerapan good corporate

governance di perusahaan melalui pengawasan lebih dan membatasi perilaku oportunistik manajemen, serta memastikan pengungkapan transaksi berelasi yang lebih transparan. Komite audit sendiri bertugas sebagai pengawas terhadap manajemen dalam pelaksanaan strategi pengelolaan, pengelolaan perusahaan, kepatuhan terhadap peraturan, dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Juvita (2013) komite audit secara tidak langsung dapat menekan manajemen laba yang merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan transaksi berelasi.

Komisaris independen sama halnya dengan komite audit yang memiliki peran penting dalam penerapan good corporate governance pada perusahaan. Komisaris independen memiliki tugas sentral dalam membantu dewan komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap pelaporan keuangan perusahaan, termasuk pengungkapan transaksi pihak berelasi. Komisaris independen bertanggung jawab untuk memastikan transaksi berelasi perusahaan adalah untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham dan bukan untuk tujuan oportunistik. BAPEPAM sendiri dalam upayanya untuk mendukung penerapan good corporate governance telah menerapkan peraturan mengenai minimal personil untuk komite audit serta komisaris independen yang wajib dimiliki dalam perusahaan, namun sangat disayangkan

karena hingga saat ini masih ada beberapa perusahaan di Indonesia yang memiliki jumlah komite audit maupun komisaris independen dibawah dari jumlah wajib minimal yang telah diatur.

Selain komite audit dan komisaris independen, auditor diharapkan diharapkan dapat pula membantu memengaruhi pengungkapan transaksi pihak berelasi sehingga informasi terkait transaksi berelasi yang disembunyikan dapat lebih diminimalkan. Auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar tentu diharapkan memiliki kualitas yang lebih baik. KAP berukuran besar seperti big-four yang memiliki kantor akuntan banyak yang tersebar di berbagai negara tentu memiliki pengalaman yang lebih baik dibandingkan dengan KAP yang hanya melakukan pekerjaan auditing pada perusahaan lokal saja. Dengan pengalaman lebih, KAP big-four dianggap lebih berani serta lebih mampu untuk memengaruhi perusahaan dalam hal pelaporan keuangan, termasuk dalam luas pengungkapan pada laporan keuangan. Dari faktor tersebut, KAP berukuran besar diharapkan lebih dalam hal membantu perusahaan mengungkapkan transaksi pihak berelasi perusahaan pada laporan keuangan perusahaan yang menjadi klien mereka.

Menurut Ahmad (2017: 133), KAP big-four memiliki kemampuan untuk mengungkapkan informasi yang lebih baik

dibandingkan KAP non big-four serta memiliki kekuatan untuk mempengaruhi tingkat pengungkapan perusahaan. Dalam kaitannya dengan pengungkapan transaksi pihak berelasi sendiri ukuran KAP masih menjadi salah satu faktor yang dipertanyakan apakah auditor dari KAP yang besar akan dapat memberikan pengaruh lebih pada keputusan perusahaan dalam pengungkapan transaksi pihak berelasi.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana tingkat efektifitas komite audit, komisaris independen, serta ukuran KAP dalam memengaruhi kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian kausal-komparatif, yaitu mengidentifikasi pengaruh antara variabel satu terhadap variabel lainnya (Widarto, 2013: 3)

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan tahunan tersebut akan diambil dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

Kemudian, untuk pengolahan data laporan keuangan dilakukan pada Maret 2018 hingga April 2018.

### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2016. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Kriteria-kriteria sampel pada penelitian ini yaitu:

- a. Perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2016.
- b. Perusahaan termasuk kedalam sektor pertambangan dan pertanian.
- c. Perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan untuk periode 2016.
- d. Perusahaan memiliki pihak berelasi pada periode tersebut.

### **Definisi Operasional Variabel**

- a. Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi (Y)

Tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi yang dimaksud yaitu dalam melaporkan transaksi berelasi perusahaan sesuai dengan standar PSAK nomor 7 tahun 2015 tentang pengungkapan transaksi berelasi. Pengukuran tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi yaitu dengan membandingkan antara jumlah pengungkapan pada laporan

keuangan dengan total pengungkapan yang diatur dalam PSAK 7.

$$Y = \frac{\text{Nilai pengungkapan}}{\text{Total pengungkapan di PSAK}}$$

b. Komite Audit (X1)

Komite audit berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan termasuk dalam mengawasi laporan keuangan perusahaan untuk memastikan tidak ada penyelewengan. Pengukuran variabel Komite Audit sendiri dilakukan dengan menghitung jumlah anggota komite audit yang dimiliki oleh perusahaan.

$$X1 = \text{Jumlah Komite Audit}$$

X1 = Jumlah Komite Audit

c. Komisaris Independen (X2)

Komisaris independen adalah bagian dari dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan bisnis dengan perusahaan. Pada penelitian ini, pengukuran variabel komisaris independen dilakukan dengan menghitung jumlah komisaris independen yang dimiliki oleh perusahaan dengan mengabaikan jumlah dewan komisaris.

$$X2 = \text{Jumlah Komisaris Independen}$$

d. Ukuran KAP (X3)

Ukuran kantor akuntan publik (KAP) dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu KAP berukuran besar (*bigfour*) dan KAP berukuran kecil (*non bigfour*).

Pengukuran variabel Ukuran KAP dilakukan dengan menggunakan variabel dummy. Perusahaan yang menggunakan KAP *bigfour* akan diberi kode satu (1) dan perusahaan yang menggunakan KAP non *bigfour* akan diberi kode nol (0) (Ahmad, 2017).

$$\begin{aligned} \text{KAP } bigfour &= 1 \\ \text{KAP non } bigfour &= 0 \end{aligned}$$

## Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan

### Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan mengambil data laporan keuangan perusahaan melalui situs web resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Pengujian asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis terdiri dari analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi berganda.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Var.	N	Mi n	Max	Mean	Std. dev.
<b>TKP</b>	52	0	0,857	0,577	0,192
<b>KA</b>	52	0	4	2,827	0,785
<b>KI</b>	52	0	4	1,731	0,888
<b>UKA P</b>	52	0	1	0,423	0,499

Sumber: Data diolah, 2018

Dalam tabel 1 diperoleh tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi memiliki nilai terendah 0 yang dimiliki oleh PT Inti Agri Resources Tbk. dan PT Perdana Karya Perkasa Tbk. yang berdasarkan jurnal pada laporan keuangan kedua perusahaan memiliki pihak berelasi namun tidak terdapat penjelasan lebih lanjut terkait transaksi berelasi perusahaan, nilai tertinggi pengungkapan sebanyak 0,857 dimiliki oleh 8 perusahaan, dan nilai rata-rata kepatuhan pengungkapan sebesar 0,577 menunjukkan rata-rata tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi berada pada angka 57,7%.

Tabel 2. Persebaran tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi

N	Katego ri	Interval	Freku ensi	Prese ntase
<b>1</b>	Tinggi	$X > 0,667$	17	32,7 %
<b>2</b>	Sedang	$0,333 \leq X \leq 0,667$	31	59,6 %
<b>3</b>	Rendah	$X < 0,333$	4	7,7 %
<b>Jumlah</b>			52	100 %

Sumber: Data diolah, 2018

Komite audit (KA) memiliki nilai terendah 0 yang dimiliki oleh 3 perusahaan, nilai tertinggi sebesar 4 yang juga dimiliki oleh 3 perusahaan, dan nilai rata-rata

komite audit sebesar 2,827 menunjukkan bahwa rata-rata komite audit yang dimiliki oleh perusahaan pada sektor utama sebanyak 2,827 anggota.

Tabel 3. Persebaran Komite Audit

No	Jumlah KA	Frekuensi	Presentase
<b>1</b>	<3	6	11,5 %
<b>2</b>	3	43	82,7 %
<b>3</b>	>3	3	5,8 %
<b>Jumlah</b>		52	100 %

Sumber: Data diolah, 2018

Komisaris independen memiliki nilai terendah 0 yang dimiliki oleh PT BUMI Resources Tbk., nilai tertinggi sebesar 4 dimiliki oleh PT Delta Dunia Makmur Tbk. dan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk., dan nilai rata-rata komisaris independen sebesar 1,731 menunjukkan jumlah rata-rata komisaris independen yang dimiliki oleh perusahaan di sektor utama sebanyak 1,731 anggota.

Tabel 4. Persebaran Komisaris Independen

No	Jumlah KI	Frekuensi	Presentase
<b>1</b>	0	1	1,9 %
<b>2</b>	1	24	46,2 %
<b>3</b>	2	17	32,7 %
<b>4</b>	3	8	15,4 %
<b>5</b>	4	2	3,8 %
<b>Jumlah</b>		52	100 %

Sumber: Data diolah, 2018

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan variabel *dummy* dimana angka 1 yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut menggunakan KAP yang berafiliasi dengan *bigfour* sementara angka 0 yang menunjukkan bahwa

perusahaan tersebut menggunakan KAP yang tidak berafiliasi dengan *bigfour*. Variabel ukuran KAP memiliki nilai rata-rata sebesar 0,423.

Tabel 5. Persebaran Ukuran KAP

No	Ukuran KAP	Frekuensi	Presentase
1	<i>Bigfour</i>	22	42,3 %
2	<i>Non-bigfour</i>	30	57,7 %
<b>Jumlah</b>		52	100%

Sumber: Data diolah, 2018

### Pengujian Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Data	0,200	Normal
Residual		

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 6, dapat diketahui bahwa data residual memiliki nilai signifikansi sebesar 0,200 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi secara normal.

#### b. Uji Multikolinearitas

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	Nilai VIF
KA	0,892	1,121
KI	0,928	1,078
UKAP	0,890	1,124

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 7, dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* pada ketiga variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF ketiga variabel lebih kecil dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada ketiga variabel.

#### c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.
KA	0,382
KI	0,701
UKAP	0,505

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 8, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari heteroskedastisitas.

### Pengujian Hipotesis

#### a. Hipotesis Pertama

Ringkasan uji hipotesis pertama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Hasil Regresi Linear Sederhana (X1)

Informasi	Hasil
Konstanta	0,316
Koefisien	0,092
$r^2$	0,143
t Hitung	2,891
Sig.	0,006

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil pada tabel 9, maka persamaan regresi untuk variabel untuk hipotesis pertama adalah:

$$TKP = 0,316 + 0,092 KA$$

Koefisien regresi sebesar 0,092 menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi. Nilai dari signifikansi t sebesar 0,006 yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat

kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi.

Tugas komite audit adalah untuk membantu dewan komisaris dalam memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen guna meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Fungsi komite audit yang memberikan pengawasan lebih pada manajemen dapat mendorong tingkat pengungkapan informasi perusahaan dalam laporan keuangan, termasuk pengungkapan transaksi pihak berelasi. Dengan makin banyaknya jumlah anggota komite audit, maka akan dapat menghasilkan tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi yang makin tinggi pula.

b. Hipotesis Kedua

Tabel 10. Hasil Regresi Linear Sederhana (X2)

Informasi	Hasil
Konstanta	0,512
Koefisien	0,037
r <sup>2</sup>	0,030
t Hitung	1,244
Sig.	0,219

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil pada tabel 10, diperoleh hasil signifikansi t sebesar 0,219 yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi. Dikarenakan tidak berpengaruh signifikan, maka nilai statistik dari variabel komisaris independen harus diabaikan dan dianggap tidak ada (Azwar, 2005: 43)

kuatnya peraturan yang diterapkan yang dapat dilihat dari masih adanya beberapa perusahaan yang belum memenuhi syarat minimum jumlah anggota pada komisaris independen, serta masih kurang maksimalnya peran komisaris independen dalam mengarahkan luas pengungkapan laporan keuangan termasuk luas pengungkapan transaksi berelasi.

c. Hipotesis Ketiga

Tabel 11. Hasil Regresi Linear Sederhana (X3)

Informasi	Hasil
Konstanta	0,533
Koefisien	0,103
r <sup>2</sup>	0,072
t Hitung	1,967
Sig.	0,055

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil pada tabel 11, maka persamaan regresi untuk variabel untuk hipotesis ketiga adalah:

$$TKP = 0,533 + 0,103 \text{ UKAP}$$

Koefisien regresi sebesar 0,103 menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi. Nilai dari signifikansi t sebesar 0,055 yang lebih kecil dari 0,10 menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi.

Kantor akuntan *bigfour* yang memiliki pengalaman lebih dibandingkan dengan KAP non-*bigfour* dapat mendorong kualitas pelaporan keuangan perusahaan,

seperti dengan cara memengaruhi luas pengungkapan pada laporan keuangan perusahaan. Dengan kemampuan serta pengalaman dari KAP *bigfour* yang dapat meningkatkan tingkat kepercayaan perusahaan terhadap akuntan dari *bigfour* yang bertugas pada perusahaan tersebut tentu akan memudahkan diterimanya pendapat serta saran dari akuntan tersebut oleh perusahaan yang nantinya dapat memengaruhi pengambilan keputusan terkait pelaporan keuangan perusahaan tersebut termasuk dalam luas pengungkapan transaksi berelasi.

#### d. Hipotesis Keempat

Tabel 12. Hasil Regresi Linear Berganda

Informasi	Hasil
<b>Konstanta</b>	0,306
<b>KA</b>	0,077
<b>KI</b>	0,015
<b>UKAP</b>	0,062
<b>r<sup>2</sup></b>	0,172
<b>f Hitung</b>	3,397
<b>Sig.</b>	0,025

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil pada tabel 12, maka persamaan regresi untuk variabel untuk hipotesis keempat adalah:

$$TKP = 0,306 + 0,077 KA + 0,015 KI + 0,062 UKAP$$

Ketiga koefisien regresi menghasilkan nilai yang positif menunjukkan bahwa komite audit, komisaris independen, dan ukuran KAP secara bersama berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi. Nilai dari signifikansi f

sebesar 0,025 yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa komite audit, komisaris independen, dan ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi.

Dalam proses pelaporan keuangan, komisaris independen serta komite audit memiliki tanggung jawab untuk mengawasi agar tidak ada pelanggaran dalam pelaporan keuangan. Komisaris independen serta komite audit dalam proses pengawasan di perusahaan tentu akan lebih diandalkan oleh para *stakeholder* mengingat status mereka sebagai pihak independen yang tidak terikat dengan perusahaan akan dapat lebih netral dalam melaksanakan tugasnya. Selain melaksanakan pengawasan, komisaris independen dan komite audit yang merupakan bagian dari upaya terwujudnya *good corporate governance* (GCG) dalam perusahaan tentunya juga bertanggungjawab untuk mendorong perusahaan memenuhi keempat prinsip dasar dari GCG itu sendiri, yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan dapat dipertanggungjawab dalam laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Selain pengawasan yang dilakukan oleh para dewan komisaris dan komite audit, auditor sebagai pihak yang menilai kelayakan laporan keuangan juga dapat menjadi pihak yang ikut membantu mendorong agar perusahaan dapat

mengungkapkan informasi yang sesuai dengan kebenaran serta seluas-luasnya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

- a. Komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 7.
- b. Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi berdasarkan PSAK 7.
- c. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi berdasarkan PSAK 7.
- d. Komite audit, komisaris independen, dan ukuran KAP secara bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi berelasi berdasarkan PSAK 7.

### **Saran**

- a. Bagi perusahaan
  - 1) Dengan hasil komite audit yang menunjukkan memiliki pengaruh positif signifikan, sebaiknya perusahaan mempertimbangkan kembali jumlah komite audit yang dimiliki, terutama untuk perusahaan yang memiliki jumlah komite audit di bawah ketentuan minimum yang telah ditetapkan yaitu minimal

memiliki komite audit sejumlah 3 orang.

- 2) Hasil penelitian menunjukkan masih kurangnya efektivitas komisaris independen, sehingga perusahaan diharapkan dapat menelaah kembali bagaimana sistem pemilihan komisaris independen pada perusahaan serta jumlah komisaris independen yang dimiliki supaya dapat memberikan pengaruh lebih kuat terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi.
- b. Bagi peneliti selanjutnya
  - 1) Dikarenakan variabel dalam penelitian ini besaran pengaruhnya masih terhitung kecil, akan lebih baik jika penelitian selanjutnya menambahkan variabel-variabel lain seperti komponen perusahaan yang termasuk dalam good corporate governance dan memiliki tanggung jawab pada pelaporan keuangan perusahaan, misalnya auditor internal dan direksi.
  - 2) Penelitian selanjutnya dapat meneliti lebih dari satu periode sehingga dapat mengetahui bagaimana keefektifan variabel bila terdapat perubahan pada variabel dependen maupun independen dari periode satu ke periode lain.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, Rudy. 2017. Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP Terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan Rerangka Integrated Reporting. *Jurnal Nominal*, Vol. 6, No. 2 : 125-135.
- Apriani, Heni Werdi. 2015. Pengaruh Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Transaksi Berelasi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol.4, No. 1:36-50.
- Azwar, Saufuddin. 2005. Signifikan atau Sangat Signifikan?. *Buletin Psikologi*, Vol. 13, No.1:38-44.
- Bursa Efek Indonesia. 2018. Laporan Keuangan dan Tahunan. Diakses tanggal 25 Februari 2018 dari <http://idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/>.
- FCGI. 2001. Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan *Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan). Jilid II, Edisi 2.
- Jensen, M.C. & Meckling, W.H. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, Vol.3, No.4: 305-360.
- Juvita, Desriana dan Sylvia Veronica Siregar. 2013. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Hubungan Besaran dan Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi dengan Manajemen Laba: Studi Empiris Perubahan PSAK No. 7. *Jurnal Akuntansi & Auditing* Vol. 10, No. 1:45-67.
- Saham OK. 2017. Daftar Emiten Saham 2016. Diakses tanggal 25 Februari 2018 dari <https://www.sahamok.com/emiten/daftar-emiten-saham-2016/>.
- Saham OK. 2018. Sektor Utama BEI. Diakses tanggal 25 Februari 2018 dari <https://www.sahamok.com/emiten/sektor-utama-bei/>.
- Sari, Ratna Candra dan Sugiharto. 2014. *Tunneling dan Corporate Governance*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sekaran, Uma. 2006. Metode Penelitian  
untuk Bisnis Edisi Keempat. Jakarta:  
Salemba Empat.